



## STRATEGI PENANGANAN KAWASAN TEPIAN SUNGAI TUKAD YEH POH SEBAGAI RECREATIONAL WATERFRONT KABUPATEN BADUNG

### IMPROVEMENT STRATEGY FOR RIVER BANK AREA OF TUKAD YEH POH AS A RECREATIONAL WATERFRONT IN BADUNG REGENCY

Made Isaka Riasmi<sup>a</sup>, Ni Ketut Agusintadewi<sup>a\*</sup>, Widiastuti<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Udayana; Denpasar

\*Korespondensi: [nkadewi@unud.ac.id](mailto:nkadewi@unud.ac.id)

#### Info Artikel:

- Artikel Masuk: 29 Maret 2021
- Artikel diterima: 21 April 2021
- Tersedia Online: 30 September 2022

#### ABSTRAK

Pengentasan masalah permukiman kumuh pada perkotaan di Kabupaten Badung merujuk pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Upaya ini diawali dengan cara mengubah daerah kumuh menjadi “Kawasan Produktif Pariwisata” pada Kawasan Tepian Sungai Tukad Yeh Poh yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan penambahan nilai ekonomi kawasan bagi masyarakat, sehingga dapat mendukung kelestarian lingkungan menuju terwujudnya kota berkelanjutan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi peningkatan kualitas lingkungan yang berpotensi kumuh pada lokasi penelitian sebagai kawasan produktif pariwisata berupa recreational waterfront di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil penelitian memaparkan strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, seperti perbaikan infrastruktur fisik, penyediaan ruang terbuka publik, dan penunjang kegiatan wisata air, seperti destinasi wisata kuliner dan olahraga. Selain itu juga, upaya lain dengan menerapkan sistem Eko-Drainase dan pembuatan biopori, penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan serta pengembangan destinasi wisata yang dapat dimanfaatkan dan dikelola berbasis masyarakat. Dengan membuat Kawasan Produktif Pariwisata, maka perekonomian masyarakat meningkat, sehingga dapat berperan serta dalam menjaga lingkungan setempat.

**Kata Kunci:** Kawasan Tepian Sungai, Strategi Penanganan, Tukad Yeh Poh, Recreational Waterfront

#### ABSTRACT

The alleviation of informal urban settlements problems in Badung Regency refers to the City Without Slum Program (KOTAKU). The program begins by changing the slum area into a "Tourism Productive Area" on the Tukad Yeh Poh River banks. This effort aims to create an environment that has added economic value to the community and contributes to preserving the urban environment towards the formation of a sustainable city. This research focuses on examining strategies for improving the quality of the environment that has the potential for a slum in the research location as a productive tourism area in the form of a recreational waterfront in Badung Regency. This research is qualitative inquiry with descriptive analysis. Data collecting was carried out by the Participatory Rural Appraisal (PRA) technique. The study results describe the strategies undertaken to improve environmental quality, such as improving physical infrastructure, providing open public spaces, and supporting water tourism activities, such as culinary and sports tourism destinations. Another strategy is implementing the Eco-Drainage system and the manufacture of bio pores, waste management based on environmentally friendly technology and the development of tourist destinations that can be utilized and managed based on the community. By making a Tourism Productive Area, the community's economy will increase to monitor the local environment.

**Keyword:** River Bank Area, Improvement Strategy, Tukad Yeh Poh, Recreational Waterfront

## 1. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh di perkotaan menjadi salah satu isu yang terkait dengan aspek sosial, budaya ekonomi, dan politik, sehingga penanganannya menjadi masalah yang berkepanjangan (Ruli & Fadjarani, 2018). Paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, salah satunya disebabkan oleh dampak permukiman kumuh yang memberikan kesan negatif dan ketidakmampuan pemerintah dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakatnya (Patrisia, 2018). Di lain sisi, permasalahan di bidang ekonomi menjadi penyebab terjadinya penurunan kedisiplinan dan ketidaktertiban masyarakat. Secara ekonomi, masyarakat yang hidup di permukiman kumuh memiliki penghasilan rendah (Krisandriyana et al., 2019). Fenomena ini menyebabkan jika perkembangan kota dibiarkan secara organik/tanpa intervensi apapun akan menyebabkan semakin tidak terkendalinya penyewaan lahan yang tidak memperhatikan penataan lingkungan, citra buruk pariwisata/kota serta menyebabkan kerawanan sosial masyarakat (Krisandriyana et al., 2019; Patrisia, 2018).

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang menangani atau melakukan upaya pencegahan terhadap timbulnya titik kumuh perkotaan. Penanganan titik berpotensi kumuh mengenai pelaksanaan KOTAKU tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 6482/02/HK/2017. Penanganan titik kumuh diawali dengan mengidentifikasi lokasi yang berpotensi menjadi kumuh dan menetapkan lokasi prioritas penanganan kumuh. Lokasi prioritas tersebut terdapat di Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Pengembangan kampung, seperti optimalisasi pemanfaatan air/*waterfront area*, pengembangan *riverside* atau pedestrian di pinggir sungai dan *integrated ecotourism* atau pengembangan kawasan ekologi untuk area hijau, dapat meningkatkan produktivitas kawasan (Kurniasari et al., 2013). Kawasan yang sebelumnya kumuh, terutama di sekitar sungai, dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata kuliner, rekreasi, dan olahraga, sehingga mengurangi titik kumuh dan dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa atraksi wisata hendaknya dilengkapi oleh ketersediaan fasilitas dan dapat dimanfaatkan oleh segala pemangku kepentingan. Pariwisata dapat mendatangkan pendapatan pada suatu daerah. Wisata air merupakan suatu kegiatan perjalanan yang tujuannya untuk menyajikan pemandangan alami dan buatan yang mendukung fasilitas wisata perairan (Primadella & Ikaputra, 2019). Wisata air merupakan kegiatan rekreasi dengan menikmati dan melakukan atraksi wisata air. Menurut Pengertian *waterfront* secara harfiah merupakan daerah pertemuan antara daratan dan perairan (Breen & Rigby, 1996, 1994), sedangkan *urban waterfront* sebagai wilayah perkotaan yang memiliki potensi pemanfaatan tepi perairan untuk menunjang kebutuhan transportasi air perkotaan (Primadella & Ikaputra, 2019; Wrenn, 1995). Optimalisasi pemanfaatan air (*waterfront*) dapat dilakukan dengan pembuatan ruang terbuka publik (Hasriyanti, 2014). Berdasarkan sifat dan jenis kegiatan, Breen & Rigby (1996) mengelompokkan konsep *waterfront city development* menjadi empat tipologi: 1) *Mixed-used waterfront* memfungsikan kawasan tepian air untuk mewadahi sejumlah kegiatan yang karakternya berbeda menjadi sebuah kawasan kota terpadu; 2) *Recreational waterfront* mewadahi aktivitas rekreasi masyarakat; 3) *Residential waterfront* sebagai kawasan permukiman; dan 4) *Working waterfront* untuk kegiatan pekerjaan warga setempat.

Kegagalan penanganan kumuh di banyak kota selama ini disebabkan karena cara pandang penyelesaiannya masih terfokus pada penataan spasial titik-titik kumuh perkotaan yang mengabaikan hak atas papan dengan tanggung jawab pemangku kepentingan (Tiawon et al., 2018). Strategi mengubah kawasan kumuh menjadi “Kawasan Produktif Pariwisata” merupakan upaya pengentasan persoalan titik kumuh di perkotaan (Primadella & Ikaputra, 2019; Kurniasari et al., 2013). Upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan berkelanjutan, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat miskin yang mendiami lokasi kumuh tersebut.

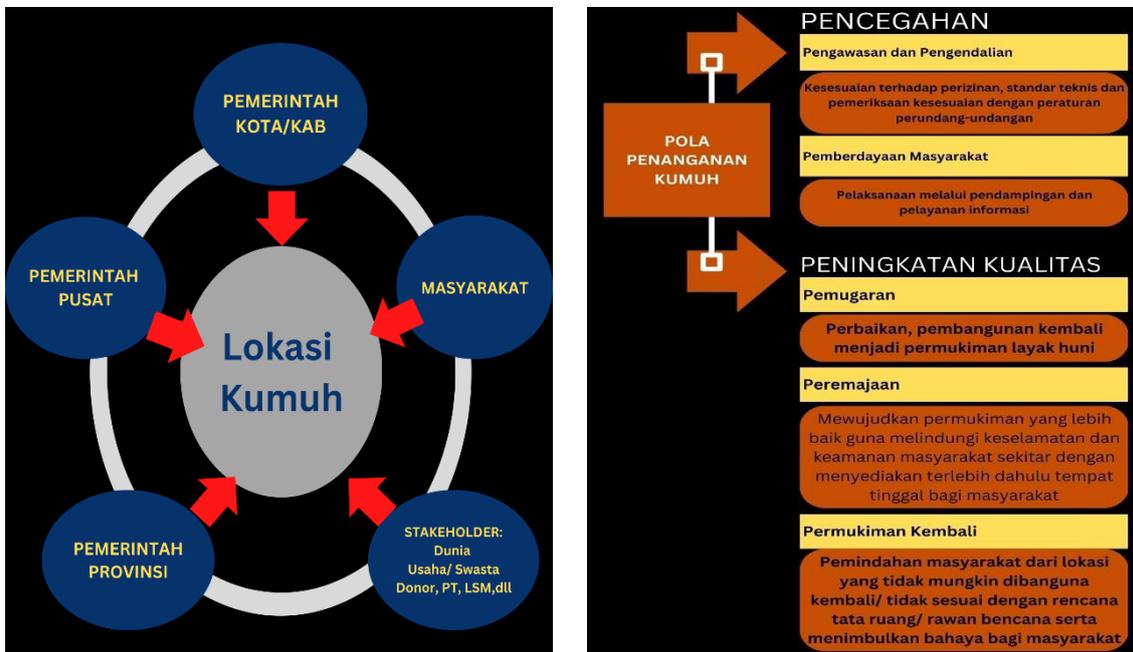
Berdasarkan permasalahan Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung tersebut, menjadi penting untuk mengkaji strategi penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam upaya pewujudan Kota Zero Kumuh (100-0-100) serta upaya peningkatan kualitas permukiman yang berkelanjutan di Kabupaten Badung. Program KOTAKU bertujuan untuk menata kembali kawasan kumuh melalui keterpaduan program, seperti penyediaan sarana dan prasarana fisik, sanitasi lingkungan, rumah layak huni, dan ruang-ruang komunal. Kabupaten Badung memiliki prioritas pelaksanaan KOTAKU pada dua titik lokasi yaitu Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Adapun lokasi titik terkumuh berada di kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh. Untuk itu dibutuhkan penelitian yang hasilnya dapat memberikan solusi penanganan titik kumuh pada kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh sebagai *recreational waterfront* Kabupaten Badung.

## 2. DATA DAN METODE

### 2.1. Metode dan Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Data terkini dan terperinci dikumpulkan berdasarkan situasi di lapangan, selanjutnya dicari hubungan dan pola sebab-akibat berdasarkan literatur terkait. Data diidentifikasi dengan teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA merupakan model penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menelusuri isu- isu yang terjadi di masyarakat dalam berpartisipasi pada perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan (Hudayana et al., 2019). PRA menjadi metode antropologi melalui pendekatan fleksibel di lapangan secara observasi-partisipasi, pengelompokan dari sudut pandang etik (peneliti) dan emik (masyarakat), serta kesesuaian pengetahuan setempat (Chambers, 1994). Data primer diperoleh dari *focus grup discussion* (FGD), wawancara, dan observasi lapangan. Teknik observasi yang digunakan adalah pengamatan langsung pada lokasi. Studi dokumentasi meliputi studi literatur, dokumen peraturan pemerintah, bahan-bahan tertulis, penelusuran data terkait melalui dunia maya, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

### 2.2. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)



Sumber: Program KOTAKU, 2017

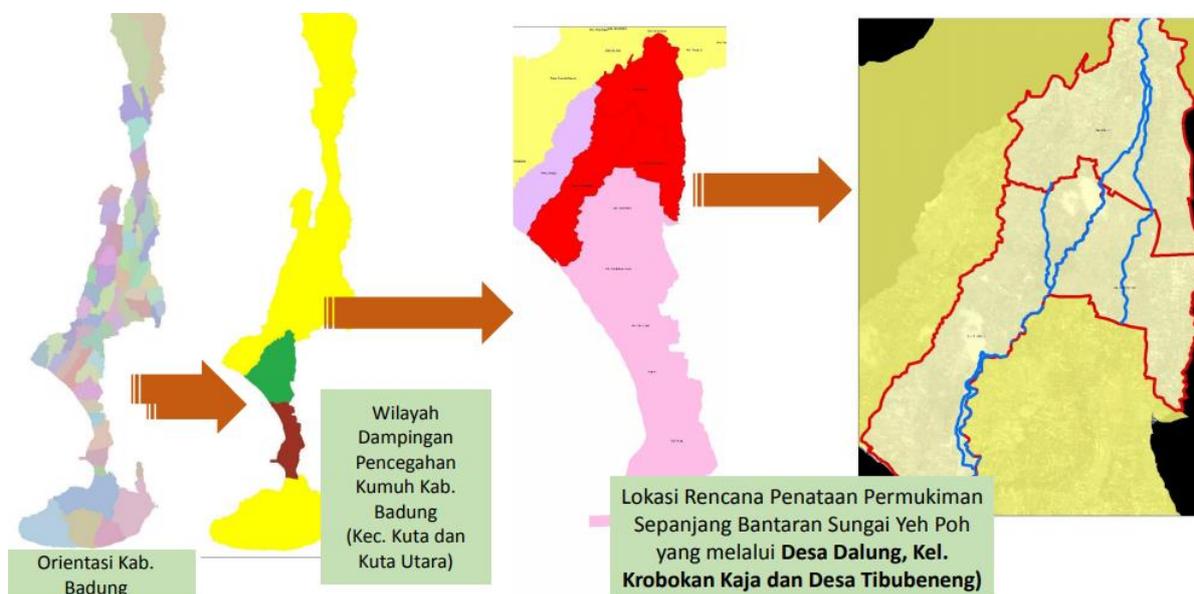
Gambar 1. Keterlibatan dalam Penentuan Lokasi Kumuh; dan Gambar 2. Pola Penanganan Kumuh

Program KOTAKU dapat mendorong sinergi masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan yang terkait untuk mempercepat pengentasan titik-titik kumuh dan gerakan 100-0-100. Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat menyediakan perumahan layak huni dengan kawasan yang produktif dan berkelanjutan. Gambar 1 memperlihatkan keterlibatan dalam penentuan lokasi kumuh dan Gambar 2 menunjukkan pola penanganan kumuh. Dengan demikian, penanganan lingkungan kumuh perkotaan di Kabupaten Badung yang merujuk pada Program KOTAKU menjadi upaya yang efektif dalam mengurangi tingkat kekumuhan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Identifikasi Masalah pada Kawasan Tepian Sungai Tukad Yeh Poh

Orientasi Prioritas Pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung berada di dua titik lokasi yakni di Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Adapun lokasi titik kumuh berada di sepanjang tepian Sungai Tukad Yeh Poh dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Diolah dari Peta Kabupaten Badung, 2020

**Gambar 3.** Lokasi Tukad Yeh Poh di Kabupaten Badung

Tukad Yeh Poh merupakan sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Badung dengan panjang aliran mencapai 16 km dan luas pengaliran sungai sebesar 14,03 km<sup>2</sup>. Aliran sungai mengalir dari hulu Kecamatan Mengwi, tepatnya di Kelurahan Kapal, melewati Kelurahan Dalung dan berakhir di hilir di Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara. Aliran sungai dimanfaatkan untuk irigasi sawah atau ladang di sekitarnya, untuk kegiatan mencuci, mandi bahkan sarana bermain anak-anak dan memancing. Namun, kegiatan masyarakat di sepanjang Tukad Yeh Poh menghasilkan limbah buruk bagi kualitas lingkungan daerah aliran sungai tersebut. Tingginya potensi sungai, tetapi tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik oleh pemerintah dan masyarakat menyebabkan munculnya potensi titik kumuh di sekitar tepian sungai.

Topografi pada lokasi penelitian berupa dataran rendah berketinggian 1-2 meter di bawah permukaan laut. Kondisi sungai dan drainase belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, bahkan digunakan untuk pembuangan sampah. Pemeliharaan sungai pun masih sangat kurang. Kawasan ini masih difungsikan sebagai kawasan lindung untuk pemeliharaan jalur sarana pembuangan air hujan, air limbah dan air kotor permukiman.

Lokasi penelitian memiliki panjang 1,2 km dan merupakan daerah hilir dari sungai-sungai di Kabupaten Badung. Dari lokasi dapat diidentifikasi beberapa masalah: 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai, sehingga sungai terkesan kotor; 2) Sungai di kawasan ini merupakan hilir dari sungai-sungai di Kabupaten Badung, sehingga semua limbah/kotoran yang dibawa dari kota akan bermuara di sungai ini; 3) Sebagai resapan air, sungai ini masih memiliki kekurangan pada daya tampungnya; 4) Daerah pinggir sungai belum tertata dengan baik, seperti belum adanya perkerasan, zona terbuka hijau dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai sebagai sarana rekreasi pengembangan; dan 5) Pengembangan daya tarik wisata yang belum memadai. Kondisi beberapa titik yang berpotensi menjadi kumuh di Desa Dalung, Desa Kerobokan Kaja, dan Desa Tibubeneng dapat dilihat secara berurutan pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.



Sumber: Observasi Lapangan, September 2020

**Gambar 4.** Kondisi Beberapa Titik yang Berpotensi Kumuh (Wilayah Desa Dalung)



Sumber: Observasi Lapangan, September 2020

**Gambar 5.** Kondisi Beberapa Titik yang Berpotensi Kumuh (Wilayah Kelurahan Kerobokan Kaja)



Sumber: Observasi Lapangan, September 2020

**Gambar 6.** Kondisi Beberapa Titik yang Berpotensi Kumuh (Wilayah Desa Tibubeneng)

### 3.2. Konsepsi dan Strategi Arah Pengembangan Aspek Kawasan “Waterfront”

Salah satu prinsip dasar untuk mewujudkan kota layak huni (*livable city*) adalah peningkatan kesejahteraan warga kota melalui penyediaan lapangan kerja dan lingkungan yang bersih dan sehat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi (Douglass, 2002). Ketersediaan ruang publik untuk berinteraksi sosial sangat dibutuhkan dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, dan keindahan lingkungan (Andi et al., 2019).

Breen & Rigby (1996, 1994) menyatakan bahwa perencanaan *waterfront* melibatkan tiga aspek penting: 1) Aspek arsitektural untuk membentuk citra (*image*) kawasan tepian sungai; 2) Aspek keteknikan, meliputi perencanaan struktur dan konstruksi dalam mewujudkan perancangan *recreational waterfront*; dan 3) Aspek sosial-budaya-ekonomi yang selalu dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar kawasan *waterfront*, seperti festival *market place* yang memadukan aktivitas hiburan dan berbelanja dengan penataan *waterfront*. Sebagai *recreational waterfront* Kabupaten Badung, penataan kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh merujuk pada pendapat Breen dan Rigby.

Dari hasil FGD dan observasi lapangan, maka dapat dirumuskan beberapa strategi pengentasan titik kumuh di lokasi penelitian menjadi Kawasan Produktif Pariwisata berbasis Program KOTAKU. Strategi ini dilakukan untuk mewujudkan kota layak huni, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Badung yaitu dengan melakukan peremajaan atau penataan secara menyeluruh, khususnya di lokasi penelitian.

#### a. Strategi Peningkatan Kualitas dalam Pengembangan Aspek Arsitektural

##### 1. Penyediaan Ruang Terbuka Publik

Skenario pengembangan pemanfaatan ruang di kawasan Tukad Yeh Poh terbagi menjadi dua zona yang terdiri atas:

- 1) Zona 1 (Zona inti/pusat) terdiri atas kawasan sepanjang badan sungai sebagai kawasan berfungsi lindung, serta kawasan tepian sungai sebagai sarana transportasi pejalan kaki, serta sarana rekreasi olahraga masyarakat serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan sungai;
- 2) Zona 2 (Zona pendukung kawasan permukiman di luar zona inti sebagai sarana penunjang dan pendukung fungsi lindung dan fungsi pemanfaatan budidaya sungai).

**Tabel 1.** Skenario Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Kawasan Tepian Sungai Tukad Yeh Poh

Jenis Kawasan	Jenis Pemanfaatan Ruang	Skenario Pengembangan
<b>Zona 1 (zona inti)</b> Kawasan Tepian Sungai	Kawasan yang memberikan perlindungan daerah sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dengan tetap mempertahankan keberadaan sungai sebagai kawasan resapan air.</li> <li>▪ Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dari pembuangan sampah secara sembarangan</li> </ul>
	Ruang terbuka hijau	Skenario pengembangan ruang terbuka hijau akan didasarkan pada standar kebutuhan RTH untuk kawasan perkotaan
	Fasilitas rekreasi dan olahraga	Dengan adanya perkerasan kawasan seperti pavingisasi dapat digunakan sebagai area rekreasi keluarga serta olahraga untuk kesehatan dan tempat rekreasi memancing.
<b>Zona 2 (zona penunjang)</b> Zona Permukiman	Kawasan dengan Keamanan yang baik seperti fasilitas parkir yang aman	Penataan dan pengembangan akses masuk ke lokasi tepian sungai yang dijadikan sebagai kawasan rekreasi dan olahraga oleh masyarakat.
	Perumahan dan sarana prasarannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengendalian pembangunan perumahan terhadap pemanfaatan sungai dan tepian untuk menunjang kegiatan zona inti.</li> <li>▪ Penyiapan sarana dan prasarana utilitas seperti saluran drainase, saluran pembuangan limbah dan air kotor, pengelolaan persampahan dengan baik.</li> </ul>

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Penataan ruang terbuka publik dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan merupakan dasar dari *livable city* atau kota layak huni. Kota layak huni hendaknya dapat memenuhi kebutuhan dasar warga kota akan fasilitas publik, serta mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan budaya warganya. Kota menjadi aman dan nyaman, tersedia ruang terbuka hijau yang cukup, fasilitas umum dan sosial yang memadai, serta penyediaan lapangan kerja untuk warganya (Douglass, 2002).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan areal yang bersifat terbuka, berbentuk jalur yang luas serta ditumbuhi tanaman secara alamiah maupun buatan. Upaya pemerintah dalam penataan ruang kota ialah mewujudkan wilayah kota dengan penyediaan RTH sebesar 3% sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Penyediaan Aktivitas Pendukung Kawasan

Adapun penataan ruang yang dikembangkan pada pinggir sungai adalah penyediaan *jogging track* sepanjang sisi sungai. Penataan kawasan tepian sungai dapat dilakukan dengan pengembangan sarana rekreasi pancing dan penataan sungai sebagai sarana olahraga dan wisata air. Penataan taman-taman untuk memperindah lansekap di pinggir sungai serta penataan areal parkir kendaraan sebagai penunjang aktivitas masyarakat di sekitar tepian Sungai Tukad Yeh Poh di Desa Dalung, Kelurahan Kerobokan, dan Desa Tibubeneng. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan tepian sungai diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang asri. Adanya keseimbangan antara lingkungan alami dan lingkungan buatan dapat menjaga keberadaan kawasan resapan air.

### b. Strategi Peningkatan Kualitas dalam Pengembangan Aspek Keteknikan

#### 1. Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan

Drainase merupakan infrastruktur dasar berupa saluran air yang difungsikan untuk mengalirkan air hujan untuk menanggulangi banjir, salah satunya dengan sistem eko-drainase dan pembuatan biopori. Sistem drainase ramah lingkungan (eko-drainase) adalah upaya pengelolaan air berlebih dengan meresapkan air hujan ke dalam tanah atau dialirkan ke sungai dengan tetap memperhatikan kapasitas sungai

tersebut (Muliawati & Mardiyanto, 2015). Air yang meresap ke dalam tanah digunakan untuk cadangan air tanah pada musim kemarau. Biopori merupakan salah satu upaya mengalirkan air hujan dari atap ke lubang peresapan di dalam tanah untuk meningkatkan lapisan air tanah. Tujuan drainase adalah: 1) Mengeringkan daerah berlumpur dan genangan air; 2) Menstabilkan permukaan air tanah; 3) Mengantisipasi erosi, terutama pada jalan dan bangunan; dan 4) Mengantisipasi kapasitas air hujan yang berlebihan.

## 2. Pengelolaan Persampahan

Sampah dikelola dengan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah rumah tangga melalui pembatasan produk yang menghasilkan sampah (*reduce*), mendaur ulang sampah (*recycle*), serta memanfaatkan kembali sampah (*reuse*). Sementara itu, penanganan sampah melalui upaya pengembangan sampah dengan teknologi ramah lingkungan melalui: 1) pemilahan sampah berdasarkan jumlah dan sifatnya; 2) penampungan sampah di TPS (tempat penampungan sementara) ke pengolahan sampah terpadu untuk pemrosesan akhir; dan 3) pengolahan akhir berdasarkan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

## c. Strategi Peningkatan Kualitas dalam Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat

### 1. Kawasan Perekonomian, Perdagangan dan Jasa

Dengan adanya pengembangan kawasan di Desa Dalung, Kelurahan Kerobokan, dan Desa Tibubeneng, maka upaya ini dapat menjadi wadah perekonomian baru bagi komunitas untuk terciptanya wahana wisata dan perdagangan yang mendukung aktivitas yang ada. Perekonomian, perdagangan, dan jasa dapat disediakan oleh masyarakat untuk merangsang kedatangan wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Namun upaya ini tetap menjaga pola kehidupan masyarakat Bali yang menasar pada perihal aspek spiritual dan harmonisasi kehidupan komunitasnya berdasarkan konsep *Tri Hita Karana*, yaitu keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Ini ditujukan untuk mengatasi perubahan pola urbanisasi dan gaya hidup materialistis yang dapat mengikis nilai lokalitas pada kawasan permukiman di tepian Sungai Tukad Yeh Poh.

### 2. Kawasan Rekreasi Masyarakat

Dengan adanya pengembangan sarana dan prasarana di Desa Dalung, Kelurahan Kerobokan, dan Desa Tibubeneng, maka masyarakat sekitar dapat meningkatkan perekonomian dengan mengadakan sejumlah lapak makanan dan minuman. Adanya tempat rekreasi dapat mengembangkan kreativitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan bagi ibu-ibu di areal sekitar kawasan *waterfront* Tukad Yeh Poh untuk menyediakan kuliner khas bagi pengunjung lokal yang sedang melakukan perjalanan spiritual maupun bagi wisatawan. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk pengembangan kawasan wisata kuliner adalah:

- 1) Menyediakan sejumlah lapak atau tempat menjajakan makanan;
- 2) Merencanakan penataan lapak-lapak kuliner;
- 3) Mensosialisasikan wisata kuliner tersebut kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan terciptanya wahana wisata yang dapat dimanfaatkan dan dikelola berbasis masyarakat, maka masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan setempat dari masalah persampahan dan keamanan.

### 3. Pengembangan Adat Istiadat dan Budaya

Keharmonisan hubungan antara *pekraman* (desa adat) dan *awig-awig* (hukum adat) dengan arahan tata ruang memungkinkan penataan ruang kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh dapat disesuaikan dengan ruang (*desa*), waktu (*kala*), dan keadaan setempat (*patra*). Selain itu, organisasi kemasyarakatan yang telah ada dapat diberdayakan untuk mendukung keajegan Bali dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat lokal. Lembaga-lembaga sosial yang baru dibutuhkan untuk keberlanjutan berbagai sumber daya.

Pengembangan sarana keagamaan, seperti Pura Kahyangan Jagat dan pura-pura khusus yang memiliki nilai-nilai suci, sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya yang unik perlu dijaga kelestariannya melalui perencanaan penataan bangunan dan lingkungan sesuai peraturan keruangan yang berlaku. Pengamanan terhadap tempat-tempat pelaksanaan prosesi budaya/keagamaan memerlukan penyediaan ruang untuk

pelaksanaan prosesi/upacara keagamaan. Tampilan identitas budaya Bali dalam pengembangan struktur tata ruang menjadi hal yang penting dalam menjaga jati diri dan karakter kawasan.

#### 4. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi

Strategi pengembangan sumber daya ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di wilayah Kabupaten Badung secara proporsional berdasarkan pendekatan fungsional dan administratif. Adanya keunggulan pada ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan tepian Sungai Tukad Yeh Poh menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi. Wilayah utara Kabupaten Badung memiliki keunggulan terkait kepariwisataan tepian air. Maka, pengembangan kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh menjadi kawasan *recreational waterfront* merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

#### 3.3. Membangun Keberlanjutan Pengentasan Titik Kumuh di Kawasan Tepian Sungai Tukad Yeh Poh

Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang paling potensial sebagai pusat aktivitas pariwisata dengan semua aktivitas kehidupan masyarakat mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk rata-rata tahunan. Timbulnya titik-titik kumuh perkotaan hendaknya ditangani secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas kawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab terciptanya kawasan kumuh di sepanjang kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh yaitu:

- 1) Faktor urbanisasi dari kawasan perdesaan di sekitar Kabupaten Badung dan migrasi penduduk dari luar Pulau Bali membutuhkan perumahan yang layak;
- 2) Keterbatasan lahan untuk perumahan dan tingginya harga lahan di perkotaan;
- 3) Faktor kemampuan daya beli masyarakat untuk menyediakan perumahan yang layak.

Dengan demikian, untuk membangun keberlanjutan program, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan skenario pemanfaatan ruang terbuka publik di Kawasan Tepian Sungai Tukad Yeh Poh sebagai *recreational waterfront* sangatlah diperlukan. Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan program ini, sehingga kawasan menjadi lebih produktif secara ekonomi dan munculnya titik-titik kumuh dapat ditangani dan diantisipasi.

Paradigma keberlanjutan yang ditawarkan kepada masyarakat kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh dapat merujuk pada apa yang dilakukan oleh Kota Pekanbaru, yaitu mempertimbangkan *social capital* masyarakatnya (Islami, 2020). Menurut Faucheux & O'connor (2000) dan Pearce & Barbier (2000), *social capital* berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi kawasan dengan memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Semakin membaiknya aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kawasan, maka akan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh, semakin menurunkan luasan permukiman kumuh, dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Badung, dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh perkotaan dan Gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Potensi kemandirian masyarakat dalam penyediaan perumahan dan permukiman perlu didorong melalui Program Bina Manusia. Program Bina Manusia merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memiliki kemauan dan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik dalam dirinya maupun lingkungan kehidupan mereka (Tiawon et al., 2018).

Aktivitas sosial-ekonomi yang dapat dikembangkan pada kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh sebagai *recreational waterfront* adalah wisata kuliner, wisata sosial-budaya, dan wisata tepian air. Ketiga jenis wisata ini dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan produktivitas

kawasan menjadi Kawasan Pariwisata Produktif. Untuk itu, aktor yang berperan dalam pengembangan wisata ini, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta, perlu ditingkatkan keterlibatannya (Kurniasari et al., 2013). Pihak swasta dapat menumbuhkan peran aktif pelaku dunia usaha dalam berinvestasi dan berpartisipasi sebagai pelaku pengembang kawasan, sedangkan masyarakat diperlukan untuk mendukung program pembangunan, dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Pemerintah menyediakan seperangkat regulasi untuk pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata, penegasan penataan ruang, peningkatan kualitas produk unggulan yang berdaya saing, mengembangkan pola atau teknik promosi dan sosialisasi, serta memberi pinjaman atau insentif kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan produktivitas ekonominya.

#### 4. KESIMPULAN

Strategi pengentasan titik-titik kumuh dapat diawali dengan mengubah kawasan kumuh tersebut menjadi “Kawasan Produktif Pariwisata”. Pemanfaatan kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh di Kabupaten Badung sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat dapat berkontribusi pada kegiatan pelestarian lingkungan untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Konsep pengembangan *urban waterfront* Tukad Yeh Poh yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan daerah aliran sungai.

Strategi peningkatan kualitas kawasan kumuh menjadi *recreational waterfront* pada kawasan tepian Sungai Tukad Yeh Poh dilakukan dengan perbaikan infrastruktur fisik dan aspek nonfisik. Secara fisik dilakukan upaya: 1) Strategi peningkatan kualitas berbasis arsitektural meliputi penyediaan ruang terbuka publik dan aktifitas pendukung kawasan Tukad Yeh Poh seperti destinasi wisata, kuliner, dan olahraga yang mengurangi titik kumuh dan dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata; 2) Strategi peningkatan kualitas berbasis keteknikan meliputi strategi penanganan pada masalah drainase dengan menerapkan sistem eko-drainase dan pembuatan biopori serta masalah persampahan dengan upaya pengurangan dan penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan; dan 3) Strategi peningkatan kualitas berbasis sosial-ekonomi-budaya yang meliputi pengembangan kawasan menjadi destinasi wisata yang dapat dimanfaatkan dan dikelola berbasis masyarakat, sehingga dapat produktif dan membantu perekonomian masyarakat, serta masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan setempat.

Untuk menjaga keberlanjutan program pengentasan titik-titik kumuh, *social capital* masyarakat menjadi aset penting dalam menumbuhkan perekonomian kawasan dengan memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program Bina Manusia dapat dilakukan agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan secara mandiri. Selain itu, peran pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) perlu bersinergi dalam menciptakan kawasan produktif pariwisata sebagai *recreational waterfront* untuk wisata kuliner, wisata air, dan wisata sosial-budaya.

#### 5. PERNYATAAN RESMI

Penelitian ini adalah penelitian mandiri yang dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian mata kuliah pada Bidang Keahlian Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Desa dan Kota, Program Studi Magister Arsitektur, Universitas Udayana.

#### 6. REFERENSI

- Andi, M., Gosal, P. H., & Hanny, P. (2019). Kajian Kota Kotamobagu menuju Kota Layak Huni (Livable City). *Jurnal Spasial: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(2), 199–210.
- Breen, A., & Rigby, D. (1994). *Waterfront, Cities Reclaim Their Edge*. McGraw Hill.
- Breen, A., & Rigby, D. (1996). *The New Waterfront: A Worldwide Urban Success Story*. Thames & Hudson.
- Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Douglass, M. (2002). From Global Intercity Competition to Cooperation for Livable Cities and Economic Resilience in

- Pacific Asia. *Environment and Urbanization*, 14(1), 53–68. <https://doi.org/10.1177/095624780201400105>
- Faucheux, S., & O'connor, M. (2000). Valuation for Sustainable Development. *Environmental Values*, 9(1), 118–119.
- Hasriyanti, N. (2014). Kajian Ruang Publik Tepi Air. *Vokasi*, 10(1), 21–38.
- Hidayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Dyah F.N., M., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 99–112. <https://doi.org/10.22146/bb.50890>
- Islami, M. E. (2020). Keberlanjutan Program Kota tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pekanbaru. *JOM Fisip Unri*, 7(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/27640>
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitriarini, E. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta. *Desa-Kota*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Kurniasari, E., Rustiadi, E., & Tonny, F. (2013). Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Studi Kasus Komunitas Kelurahan Kalimulya, Kota Depok. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2), 32–47. [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v5i2.24637](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i2.24637)
- Muliawati, D. N., & Mardyanto, M. A. (2015). Perencanaan Penerapan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (Eko-Drainase) Menggunakan Sumur Resapan di Kawasan Rungkut. *Jurnal Teknik ITS*, 4(1), D16–D20. <http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v4i1.8833>
- Patrisia, N. E. (2018). Penataan Perumahan Kumuh Kota Berbasis Kawasan. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.37676/professional.v4i2.617>
- Pearce, D., & Barbier, E. B. (2000). *Sustainable Economy*. Earthscan.
- Primadella, & Ikaputra. (2019). Waterfront Culture sebagai Atraksi Wisata Tepian Air. *Jurnal Arsitektur Zonasi*, 2(2), 88–97.
- Ruli, A., & Fadjarani, S. (2018). Penataan Permukiman Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1), 56–67. <https://doi.org/10.15294/jg.v15i1.11888>
- Tiawon, H., Widati, T., & Amiany. (2018). Kajian Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Kuala Kapuas. *Jurnal Teknika*, 2(1), 82–89.
- Wrenn, D. (1995). Waterfronts: Cities Reclaim their Edges. *Landscape Journal*, 14(1), 95–96. <https://doi.org/10.3368/lj.14.1.95>